



Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (E-Government) dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung

Ahtu Duriat¹⁾; Rifqi Khairul Arifin²⁾; Hari Busthomi Ariffin³⁾

^{1,2,3)} *Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan*

Email: ¹⁾ adur.grt.45@gmail.com ; ²⁾ rifyarifin88@gmail.com ; ³⁾ budinugaraha965@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [22 Desember 2022]

KEYWORDS

E-Government, Public Services, Society 5.0.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berupaya menjawab Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung Keseluruhan informan ini adalah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung; Harus ada upaya pemerintah dalam menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung yaitu; Manfaatkan SDM aparatur dalam mengelola -Government; Memberikan tugas yang jelas kepada pegawai untuk mengeloladana E-Government; Kekuatan kota Bandung memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan bidang masing-masing. Ini bisa dijadikan peningkatan pengetahuan tentang Smart Governance; Terdapat 350 aplikasi yang mendukung Bandung Smart City adanya Bandung Command Center sebagai pusat kendali teknologi informasi Bandung Smart City yang juga dapat dijadikan tempat wisata edukasi Kota Bandung.

ABSTRACT

This research seeks to answer Innovation Based Public Services (E-Government) in Facing the 5.0 society revolution in the city of Bandung. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. The research method used is descriptive with a qualitative approach. This research was conducted at the Bandung City Government Communication and Informatics Service. All of these informants were employees at the Bandung City Government Communication and Informatics Service; There should be government efforts in implementing E-Government Based Public Service Innovation in Facing the societal revolution 5.0 in the city of Bandung, namely Utilizing apparatus human resources in managing -Government; Provide clear assignments to employees to manage E-Government funds; The strength of the city of Bandung has competent Human Resources (HR) according to their respective fields. This can be used as an increase in knowledge about Smart Governance; There are 350 applications facing the 5.0 society revolution the existence of the Bandung Command Center as the information technology control center for Bandung Smart City which can also be used as an educational tourist spot for the City of Bandung.

PENDAHULUAN

Pada era digital sekarang muncul konsep society 5.0. Munculnya konsep era society 5.0 dimana hasil perkembangan dari era revolusi industri 4.0. Konsep industri 4.0 yang mengedepankan manusia sebagai sumber inovasi dan tidak terlepas dari teknologi. Munculnya konsep ini membuat permasalahan manusia di perkotaan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan, salah satunya dengan konsep kota cerdas. (Ardinata et al., 2022). Sedangkan revolusi industri 5.0 atau society 5.0 semua proses dilakukan secara sistem otomatis di dalam semua proses aktivasi. Perkembangan teknologi internet semakin berkembang tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia. Konsep society 5.0 juga menjadi suatu basis bagi proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat secara online (Heri et al., 2021).

Oleh karena itu pemerintah diwajibkan cerdas untuk mampu menghadapi era globalisasi dan revolusi 5.0. Secara tidak langsung adalah bahwa tantangan globalisasi dan revolusi digital tidak mungkin dapat dihindarkan dimana dari prinsip transparan dan akuntabilitas (Kosanke, 2019).

Implementasi kebijakan ada peluang dan tantangan untuk dapat memanfaatkan data dari bermacam aspek yang terintegrasi sehingga membagikan kemudahan kepada penduduk untuk mengakses pelayanan (Nugraha & Lestari, 2022).

Implementasi pelayanan publik berbasis inovasi atau yang lebih dikenal dengan istilah E-Government, sudah menjadi agenda Pemerintah Kota Bandung sudah sejak tahun 2001. Pemanfaatan teknologi berbasis inovasi dalam tatakelola pemerintahan sendiri di Pemerintah Kota telah dirasakan manfaatnya. Khususnya dalam mewujudkan Good Governance yang efektif, efisien, transparansi dan

akuntabilitas. Kualitas kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi semakin meningkat dan memuaskan (Adibowo & Putri, 2016). Tepatnya pada akhir tahun 2014, semua pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan sudah berbasis internet dengan memanfaatkan E-Government. E-Government Kota Bandung dapat di akses melalui laman : <https://bandung.go.id/> (Verdania Latif, 2021).

Salah satu inovasi yang telah dilakukan berupa perubahan tatakelola pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi. Pergeseran pelayanan publik juga ditandai suatu asal mula implementasi era Big Data atau era Data Teknologi (Sari & Saputra, 2022). Secara rinci usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kota Bandung dengan konsep E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung antara lain :

1. Memasang 5000 titik wifi di setiap Ruang Publik (<http://www.sinarpaginews.com> diakses pada Senin 10 Oktober 2016 pukul 22.31).
2. Aplikasi Panic Button bagi warga Bandung untuk menindaklanjuti tindakan kriminalitas (<https://kominfo.go.id> diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.34)
3. Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Layanan Aspirasi dan (<https://portal.bandung.go.id/launching-lapordiakses> pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.51).
4. Pelayanan public lewat jaringan sosial media seperti twitter oleh seluruh SKPD Kota Bandung (<https://portal.bandung.go.id/koneksi/sosial-mediadiakses> pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.59).
5. Dibangunnya Bandung Command Center sebagai pusat kendali kota Bandung. (<http://www.bumn.go.id/inti/berita> diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 23.02).
6. Pembangunan Bandung Technopolis yang akan menjadi prototype penerapan Society 5.0 di Indonesia (<http://jabar.tribunnews.com/2015/03/05/technopolis> diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 23.04).

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 2020

Hasil satu buah studi mengungkapkan jika tata kelola pemerintahan berbasis E- Government 66% “ baik”, ditinjau dari memajukan sistem pelayanan yang profesional 69% baik, menata proses kerja pemerintah 70% baik, memakai teknologi data secara maksimal 62% baik, memajukan kapasitas sumber energi manusia 64% baik. Pelayanan publik 67% “ baik”, ditinjau dari tersedianya sarana prasarana yang baik 71% baik, bertanggung jawab kepada tiap konsumen sejak dini sampai akhir 66% baik, sanggup melayani secara kilat 58% kurang baik, sanggup melayani secara pas 66% baik, sanggup berbicara 76% baik. Aspek yang membatasi pelayanan publik ialah pemahaman 64% mempengaruhi, ketentuan 65% mempengaruhi, organisasi 60% kurang mempengaruhi, pemasukan 63% mempengaruhi, kemampuan petugas 62% mempengaruhi, aspek fasilitas 86% sangat mempengaruhi (Amiruddin et al., n.d.).

Tetapi tidak hanya itu pula masih ditemui sebagian permasalahan. Pengelolaan E- Government mengalami revolusi society 5. 0 dalam sesi pelaksanaan masih lemah dari segi pengawasan. Kedua, fasilitas belum mencukupi buat implementasi E- Government. Ketiga, pola ikatan antarunit kerja serta norma- norma yang berlaku butuh ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Keempat implementasi kebijakan E- Government dalam mewujudkan Smart Governance telah berjalan, namun belum memegang segala aspek pencapaian keberhasilan (Nugraha, 2020). Tidak hanya itu, Implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya pas sasaran memandang kalau warga belum mengenali kebijakan ini perihal ini diakibatkan dari Sumber Energi Manusia, Sumber Energi Anggaran, Transmisi kejelasan serta konsistensi di antara organisasi, kognisi(uraian) aparat, reaksi, serta keseriusan dalam melakukan kebijakan, sumber energi ekonomi serta kekuasaan dinilai masih kurang (Office, 2011).

Secara detail fenomena permasalahan mengenai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E- Government dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut;

Permasalahan pertama terkait kondisi lingkungan, pertumbuhan penduduk di Kota Bandung terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk dari wilayah lainya Selain itu perubahan karakteristik Kota Bandung dari karakteristik pertanian menjadi perkotaan atau yang biasa disebut wilayah dengan proses urbanisasi, disisi lain sumber daya lahan terbatas dan tetap, sehingga pertumbuhan penduduk tidak bisa di barengi dengan ketersediaan lahan yang nantinya akan menimbulkan kepadatan penduduk, melahirkan permukiman-permukiman kumuh, limbah domestik maupun rumah tangga, kemacetan dan juga masalah-masalah lingkungan lainya, hal ini apabila terus di biarkan tentu akan menimbulkan kota yang tidak sehat, sehingga perlu upaya penyelesaiannya.

Dimensi hubungan organisasi, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui oleh penulis saat melakukan pra penelitian di Pemerintah Kota Bandung. Permasalahan utama adalah keengganan SKPD untuk membagi data kepada Diskominfo. Anggapan yang ada, apabila Diskominfo ingin mengolah data dan mengintegrasikan data maka silahkan Diskominfo mencari data sendiri. Hal ini memperlihatkan



kurangnya komitmen SKPD dalam menerapkan smart government. Beberapa permasalahan lain terkait pelaksanaan Society 5.0, khususnya pada dimensi smart government diduga juga banyak terjadi dalam penerapannya.

Segi komunikasi, yaitu sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kota Bandung belum merata di setiap wilayah daerah serta kebijakan tersebut belum seluruhnya diterapkan oleh kabupaten / kota . Padahal Sosialisasi mengenai Society 5.0 telah dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bandung salah satunya dengan diadakannya Society 5.0 Forum yang dilaksanakan di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Jumat 2 September 2016 oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung. Society 5.0 Forum yang dihadiri oleh 38 kepala daerah dan perwakilan dari 76 Kabupaten/kota se-Indonesia. Selain itu, sosialisasi yang belum merata di setiap wilayah daerah disebabkan oleh masyarakat yang belum melek teknologi .Masih banyak masyarakat yang tidak tahu teknologi bahkan jarang mengakses internet maupun media lainnya sehingga informasi tidak tersampaikan. Padahal berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mensosialisasikan Penerapan Society 5.0 di masyarakat yaitu melalui berbagai media seperti, media cetak, online, radio, TV.

Sumber daya non manusia Pemerintah Kota Bandung saat ini berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memperbaiki infrastruktur jaringan melalui pembangunan daktin ,yaitu penurunan kabel-kabel listrik melalui pipa ke dalam bawah tanah serta membuat MCF (microcellful), gunanya untuk penyebar sinyal HandPhone. Pembangunan dakting dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses pelayanan serta memperindah estetika tata ruang kota agar terlihat rapi.

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, Jika suatu pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Namun hingga saat ini masih ada beberapa hal yang sulit untuk diubah, terutama hal terkait perilaku. Salah satu contohnya adalah perilaku birokrasi. Misalnya, dalam hal perizinan, masih banyak aparat Pemerintah Kota yang bekerja terlalu lamban. Sehingga, Walikota yang harus turun tangan sendiri ke lapangan untuk sidak.

Perilaku birokrasi sangat berpengaruh dalam membangun sebuah Kota yang Smart, sehingga dalam pelaksanaan program Society 5.0 menjadikan kota yang efisien untuk masyarakat, kota yang layak tinggal, pelayanan publik terjadi dengan baik, tingkat perekonomian tinggi, serta tingkat infrastruktur kota tertata dan rapih. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung ingin mewujudkan itu semua dengan membangun Smart People sebagai penunjang Society 5.0. Namun, Untuk menjadikan Smart People itu tidaklah mudah sehingga Walikota Bandung terlebih dahulu membangun Smart Government karena pemerintah sebagai implementor dalam Society 5.0.

Dari fenomena-fenomena yang duah dijelaskan, tentunya perlu melakukan penelitian untuk mrngukur sebarapa siap pelayanan publik berbasis inovasi (E-Government) dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung. Peneliti memilih kota Bandung sebagai lokus penelitian karena Kota Bandung salah satu kota yang sudah menerapkan konsep Samrt City. Dimanikota Bandung mengkalim semua pelayanan sudah berbasis digital.

LANDASAN TEORI

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan yag terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Utami, 2021). Pelayanan publik pada dasarnya menunjukkan peranannya, teknologi yang paling menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. cocok untuk diterapkan disini adalah teknologi. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah informasi (e-Government). memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan Electronik government (e-Government) publik yang di perlukan oleh masyarakat, mulai sendiri adalah penggunaan teknologi informasi dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun oleh pemerintah untuk memberikan informasi pelayanan-pelayanan lain dalam rangka dan pelayanan bagi warganya. E-government memenuhi kebutuhan masyarakat (Savinatunazah, 2019).

E-Government

E-government merupakan penyediaan pelayanan publik oleh pemerinttah secara online. E government adalah penggunaan teknologi informasi dengan tujuan untuk memberikan layanan secara elektronik bagi warga masyarakat, bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Dengan adanya e government ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah (Arwati & Latif, 2019).

E-Government merupakan terobosan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, 2022).

Penyelenggaraan pemerintah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikenal sebagai Electronic Government atau E-Government (Adibowo & Putri, 2016).

E Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan informasi mengenai kegiatan organisasi sektor publik (Verdania Latif, 2021).

Society 5.0

Revolusi industri 5.0 semua proses dilakukan secara sistem otomatis di dalam semua proses aktivasi, dimana perkembangan teknologi internet semakin berkembang tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia namun juga menjadi suatu basis bagi proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat secara online (Heri et al., 2021).

Dirumuskan dua tindakan strategis untuk menghadapi tantangan society 5.0, yaitu : (1) peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan (2) peningkatan kemampuan pemasaran digital (Pertanian, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya menjawab Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Suharsaputra, 2012).

Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada data “kasar” . Sajian data, sub proses ini merupakan suatu bentuk “penyajian” yang diartikan sebagai sekumpulan informasi. Penarikan kesimpulan, dalam sub proses ini, peneliti mulai melakukan tindakan interpretasi yaitu memberikan makna pada data atau informasi yang telah disajikan (Nugroho, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung Keseluruhan informan ini adalah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dan Informan tersebut yaitu:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung (1 orang).
2. Kepala Bidang (1 orang) yaitu Bidang Umum Badan Komunikasi dan Informatika dan Informasi Pemerintah Kota Bandung.
3. Kepala Seksi (1 orang) yaitu diwakili Seksi Umum.
4. SKPD Pemerintah Kota Bandung (3 orang).
5. Camat Buah Batu dan Camat Kiara Condong (2 orang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan ada 3 (tiga) strategi yang bisa digunakan dalam meningkatkan kesiapan ASN dalam menggunakan teknologi guna mempercepat pembangunan berkelanjutan di Era society 5.0 yaitu: 1) pemerintah memerlukan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi untuk mempersiapkan ASN untuk jangka waktu satu tahun yang meliputi inventarisasi jenis kompetensi teknis melalui dialog atasan-bawahan. 2) melaksanakan pengembangan kompetensi teknis pegawai melalui jalur pelatihan. 3) melakukan evaluasi untuk menilai apakah perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kesiapan ASN sudah sesuai atau tidak dan juga mengukur kemanfaatan program pengembangan terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja pejabat fungsional serta kinerja instansi (Kusuma, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government di Kota Bandung telah terpenuhi dilihat dari berbagai sistem dan layanan yang telah diimplementasikan. Butuh penelitian lebih lanjut mengenai aspek pendukung Society 5.0 lainnya sehingga Kota Bandung dapat dikatakan sebagai kota berkonsep Society 5.0 (Yusuf & Jumhur, 2018).



Peneliti melakukan wawancara, observasi dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat efektivitas Implementasi Kebijakan E-Government dalam menciptakan Smart Governancedi Kota Bandung yang lokusnyapada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yakni: (1) kondisi ligkungan, (2) hubungan antar organisasi, (3) sumber daya, dan (4) agen penerima program. Keempat dimensi tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Kondisi Lingkungan

Keadaan kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik. Hal ini dibuktikan dari pendapat Informan bahwaada kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan para aparatur yang didalamnya selalu berusaha melalui kegiatan-kegiatan dalam mengelola danaE-Government. Sistem sosial yang diterapkan oleh Instansi Dinas Kesehatan sudah berjalandan budaya kerja sudah bisa diikuti oleh aparatur Dinas, namun apabila ada kekurangan perlu ditingkatkan lagi.

Hubungan antar Organisasi

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi hubungan antar organisasi untuk Implementasi Kebijakan PMK 248 Tahun 2010 tentang Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 di Kota Bandung sudah berjalan sesuai ketentuan. Meskipun sudah ada pola kerjasama terkait Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 tapi dalam tahap pelaksanaan masih lemah dalam segi pengawasan. Untuk mengatasi hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melakukan komunikasi secara intens dalam melakukan kerjasama yang lebih baik dalam PengelolaanE-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 ini.

Sumber Daya

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi sumber daya untuk Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa di Kota Bandung sudah mengerti dalam pengelolaan dana Dekosentrasi. Sarana dan prasara sudah ada ada tapi masih belum secara maksimal untuk mendukung dalam pengelolaan dana dekosentrasi tersebut. Selain itu sanksi yang berlaku sudah berjalan tetapi masih perlu peningkatan aparatur lebih sadar akan tanggung jawab kerjanya.

Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana implementasi kebijakan khususnya dalam Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 di Kota Bandung sudah baik dan mempuni. Meskipun ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan dana E-Government supaya lebih baik lagi. Diantara pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Agar setiap tanggung jawab dan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 dapat terlaksana secara efektif dan efesien sesuai ketentuan yang berlaku serta terhindar dari masalah-masalah khususnya masalah korupsi.

Tabel 1. Impelemetasi Kebijakan E-Government dalam Menghadapi Revolusi Society 5.0 di Kota Bandung

Impelemetasi Kebijakan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 di Kota Bandung	
Dimensi	Sumber Daya
Indikator	1. Kondisi Lingkungan 2. Hubungan antar Organisasi 3. Sumber Daya
Hasil	1. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik 2. Tahap pelaksanaan masih lemah dalam segi pengawasan 3. Belum secara maksimal untuk Pengelolaan <i>E-Government</i> 4. Pengelolaan <i>E-Government</i> masih belum memadai.

Sumber: Diolah peneliti, tahun 2022.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan umum penelitian menunjukkan bahwa Impelemetasi Kebijakan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik, akan tetapi masih terdapat kekurangan. Hal ini bisa dilihat dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. diantaranya:

Pertama, Kadaan kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik. Tebukti dengan pendapat Informan bahwa ada kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam upaya Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0.

Kedua, terkait Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 tapi dalam tahap pelaksanaan masih lemah dalam segi pengawasan. Pola Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 masih belum merata terdapat perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain.

Ketiga, dari hasil wawancara bersama respondn bisa disimpulakn bahwa dimensi sumber daya untuk Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, belum secara maksimal untuk Pengelolaan E-Government .

Keempat, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana implementasi kebijakan khususnya dalam Pengelolaan E-Government masih belum memadai dalam menghadapi revolusi society 5.0 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah bagus. Meskipun pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaatkan SDM aparatur dalam mengelola -Government.
2. Memberikan tugas yang jelas kepada pegawai untuk mengeloladana E-Government.
3. Kekuatan kota Bandung memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan bidang masing-masing. Ini bisa dijadikan peningkatan pengetahuan tentang Smart Governance.
4. Terdapat 350 aplikasi yang mendukung Bandung Smart City adanya Bandung Command Center sebagai pusat kendali teknologi informasi Bandung Smart City yang juga dapat dijadikan tempat wisata edukasi Kota Bandung menjadi menjadi inspirasi untuk daerah lain yang ingin juga menjadi daerah yang memiliki smart governance, pemerintah setempat mampu mengelola data dan informasi yang ada dengan cepat sehingga bisa memberikan perkembangan yang baik dalam membangun kota Bandung



DAFTAR PUSTAKA

- Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsaputra, U. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
- Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). Penerapan E-Government dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(2), 91–100.
- Amiruddin, S., Dema, H., & Syarifuddin, H. (n.d.). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA BINA BARU BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI ERA INDUSTRI 4.0. 9, 184–191.
- Ardinata, R. P., Waryono, W., Rahmat, H. K., & Andres, F. S. (2022). Pengembangan Konsep Smart City Menuju Era Society 5 . 0 : Sebuah Kajian Literatur. *Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 1(1), 33–44.
- Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Transparansi Keuangan dalam E Government Kota Bandung. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 5(2), 66–74. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2.2736>
- Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, A. Y. K. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 254–263. <https://stia-binataruna.ejournal.id/PUBLIK/article/view/338>
- Heri, H., Sandika, F., Apriliani, F., Ramadhan, G., & Adilah, H. (2021). Revolusi Industri 5.0 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi Desa. *Neo Politea*, 2(1), 1–11. <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/neopolitea/article/view/291/163><https://journal2.unfari.ac.id/index.php/neopolitea/article/view/291>
- Kosanke, R. M. (2019). STRATEGI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGHADAPI TANTANGAN INDUSTRI 5.0.
- Kusuma, F. K. (2022). Kesiapan Dan Tantangan Aparatur Sipil Negara Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Guna Mempercepat Pembangunan Berkelanjutan Di Era Revolusi Digital Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 732–739.
- Nugraha, B. (2020). Implementation of E-Government Policy in Making Smart Governance at Government Communication and Informatics Implementasi Kebijakan E-Government dalam Mewujudkan Smart Governance pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung. 2, 13.
- Nugraha, B., & Lestari, R. P. (2022). Keadaan Big Data Dapat Menjadi Peluang. 5(1), 10–17. <http://jurnal.iuqibogor.ac.id>
- Nugroho. (2020). Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 124–131.
- Office, R. (2011). Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. *Journal of Transportation*, 1(1), 26–34.
- Pertanian, J. E. (2022). STRATEGI SITEM PEMASARAN DALAM MENGHADAPI SOCIETY 5.0 (STUDI KASUS: BUMDes SUMBER SEJAHTERA, DESA PUJON KIDUL, KABUPATEN MALANG). 6, 1655–1670.
- Sari, M. I. P., & Saputra, M. H. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Menuju Era Data Technology di Masa New Normal. *Prosiding Ilmu Pemerintahan*, 243–257. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/IP/article/view/2713>
- Savinatunazah, V. (2019). Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. *Jurnal ilmiah Ilmu Adminisitrasi Negara*, 6(2), 70–77. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2276/2029>
- Utami, P. (2021). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Dukcapil Dan Kantor Pertanahan Kota Taangerang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIJA)*, 11(1), 1–10.
- Verdania Latif, D. (2021). Evaluasi Penerapan E Government Kota Bandung ditinjau dari Transparansi *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*. 2(January), 24–31.

Yusuf, R. M. S., & Jumhur, H. M. (2018). Penerapan E-Government Dalam Membangun Smart City Pada Kota Bandung Tahun 2018 E- Government Implementation in Building Smart City in Bandung 2018. E-Proceeding of Management, 5(3), 3126–3130.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/8822/4912>